

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten OKU

1. Sejarah



Ogan Komering Ulu merupakan sebuah kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota kabupaten di Baturaja Timur. Penamaan Ogan Komering Ulu berasal dari adanya dua sungai yang mengalir di sekitaran wilayah Kabupaten OKU yakni Sungai Ogan dan Sungai Komering. Kabupaten Ogan Komering Ulu ditetapkan sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Selatan pada tahun 1878 berdasarkan kesepakatan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 1997. Sedangkan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Sumatera Selatan menjadi Provinsi didalam Negara Republik Indonesia, kemudian Kabupaten OKU baru menjadi sebuah Kabupaten yang sah.

Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom dengan pemberian kekuasaan yang lebih luas dalam menjalankan peraturan serta kepengurusan rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang ditegaskan dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821). Oleh karena itu dengan diadakannya Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai daerah otonom, maka pada tahun 2003 Kabupaten Ogan Komering Ulu dimekarkan menjadi 3 wilayah bagian, yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan ibukota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dengan ibukota Martapura, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dengan ibukota Muaradua.

Tabel 3.1

Masa kepemimpinan di Kabupaten OKU sejak tahun 1949 hingga sekarang

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	M. Said	1 Tahun (1949-1950)
2.	Nawawi	(2 tahun) 1950-1952
3.	Aziz	2 Tahun (1952-1954)
4.	Mustofa	2 Tahun (1954-1956)
5.	Saleh	2 Tahun (1956-1958)
6.	Harum	4 Tahun (1958-1962)
7.	Usman Raden Mangku	2 Tahun (1962-1963)
8.	Rusman Effendi Rustam	5 Tahun (1963-1968)
9.	M. Muhammad Muslimin	11 Tahun (1968-1979)
10.	HM. Saleh Hasan, SH	10 Tahun (1979-1989)
11.	Drs. H, Mulkan Aziman	5 Tahun (1989-1994)
12.	Amiruddin Ibrahim	5 tahun (1994-1999)
13.	Ir. Syahrial Oesman, MM.	2 Tahun (2000-2002)

14.	Eddy Yusuf, SH., MM.	6 Tahun (2002-2008)
15.	Drs. H. Yulius Nawawi	2 Tahun (2008-2010)
16.	Drs. H. Yulius Nawawi	5 Tahun (2010-2015)
17.	Drs. Kuryana Azis	1 Tahun (2014-2015)
18.	Drs. Kuryana Azis	5 Tahun (2016-2021)

Sumber:okukab.go.id

2. Letak Geografis dan Demografis

a. Geografis

Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak di antara 103° 25' sampai dengan 104° 50' Bujur Barat (Grid UTM 9.655 Kilometer sampai dengan 9.799 Kilometer) dan 3° 40' sampai dengan 4° 55' Lintang Selatan (Grid UTM 320 Kilometer sampai dengan 404 Kilometer).

Kabupaten Ogan Komering Ulu juga merupakan sebuah kabupaten yang strategis dengan daerah pelaluan ke berbagai daerah yaitu adanya jalan lintas tengah Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan. Jalur lintas tengah ini menjadi perlintasan yang menghubungkan kota-kota yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, adanya jalan lintas tengah ini menjadikan Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup terbantu perekonomiannya dengan dipermudahnya pengiriman maupun penerimaan barang dengan adanya perlintasan kendaraan-kendaraan yang memuat barang dari berbagai daerah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering ulu memiliki luas wilayah 4.797,06 Km². Sedangkan dalam data Ogan Komering Dalam Angka (BPS) yang dihitung berdasarkan pemetaan BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki luas 361.760 Ha.

Tabel 3.2

Luas Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menurut Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, Ibu Kota dan Jarak Ibu Kota Kabupaten OKU Pada Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (KM)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten
1	Lengkiti	512,93	22 Desa	Tanjung Lengkayap	25 Km
2	Sosoh Buay Rayap	385,30	11 Desa	Penyandingan	11 Km
3	Pengandonan	543,61	12 Desa	Pengandonan	40 Km
4	Semidang Aji	707,86	21 Desa	Ulak Pandan	27 Km
5	Ulu Ogan	597,37	7 Desa	Mendingin	63 Km
6.	Muara Jaya	26,32	7 Desa	Muara Saeh	
7.	Peninjauan	725,92	16 Desa	Peninjauan	45 Km
8.	Lubuk Batang	724,81	15 Desa	Lubuk Batang Baru	40 Km
9.	Sinar Peninjauan	84,94	6 Desa	Marga Bakti	49 Km
10.	Kedaton Peninjauan	183,31	8 Desa	Kedaton	45 Km
11.	Baturaja Timur	110,22	13 Desa, 9 Kelurahan	Kemalaraja	1 Km
12.	Lubuk Raja	64,42	7 Desa	Batumarta II	29 Km
13.	Baturaja Barat	125,05	12 Desa, 5 Kelurahan	Tanjung Agung	8 Km
Kabupaten OKU		4.797,06	143 Desa, 14 Kelurahan		

Sumber: (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKU) , Tahun 2019.

Dari tabel tersebut dapat dilihat jika wilayah administrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terbagi menjadi 13 Kecamatan yang terdiri 14 Kelurahan dan 143 Desa dengan Kecamatan Baturaja Timur sebagai Ibu kota Kabupaten. Dari tabel diatas juga bisa dilihat jika Kecamatan Peninjauan merupakan wilayah paling luas yaitu 725,92 KM² atau sekitar 15,13%, disusul Kecamatan Lubuk Batang dengan luas 724,81 KM² atau 15,11% dan Semidang Aji dengan luas 707,86 KM² atau 14,76%. Jumlah Desa terbanyak terdapat di Kecamatan Lengkiti yaitu 22 Desa. Dan Jarak terjauh antar ibukota kabupaten Baturaja Timur yaitu Kecamatan Ulu Ogan (Mendingin) yaitu 63 KM², Kecamatan Sinar Peninjauan (Marga Bakti), dan Kecamatan Peninjauan/ Kecamatan Kedaton Peninjauan yang sama-sama berjarak 45 KM².

Tabel 3.3

Sedangkan batas-Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yaitu :

Sebelah Utara	Kabupaten Muara Enim : Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai. Kabupaten Ogan Ilir : Kecamatan Muara Kuang
Sebelah Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) : Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandnag Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Tinggi, dan Kecamatan Muaradua Jisam
Sebelah Barat	Kabupaten Muara Enim : Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, dan Kecamatan Lubai.
Sebelah Timur	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) : Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, dan Kecamatan Martapura.

b. Demografi

Seiring dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan zaman menyebabkan hal ini turut berdampak pada jumlah manusia di dunia tiap tahunnya. Hal ini juga tentunya terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang mengalami peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya, dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Peningkatan Jumlah Penduduk tahun 2017-2019

Kecamatan	2017	2018	2019
Lengkiti	28.112,00	28.467,00	28.779,00
Soso Buay Rayap	13.115,00	13.320,00	13.476,00
Pengandonan	10.052,00	10.179,00	10.298,00
Semidang Aji	27.392,00	27.738,00	28.061,00
Ulu Ogan	9.647,00	9.768,00	9.882,00
Muara Jaya	7.333,00	7.426,00	7.512,00
Peninjauan	31.964,00	32.367,00	32.745,00
Lubuk Batang	30.039,00	30.417,00	30.772,00
Sinar Peninjauan	22.830,00	23.118,00	23.388,00
Kedaton Peninjauan	12.208,00	12.362,00	12.507,00
Baturaja Timur	100.351,00	110.615,00	102.803,00
Lubuk Raja	30.472,00	30.856,00	31.217,00
Baturaja Barat	35.537,00	35.984,00	36.405,00
Ogan Komering Ulu	359.092,00	363.617,00	367.865,00

Sumber: (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKU)

3. Lambang



Lambang Ogan Komering Ulu ini memiliki arti sebagai berikut :

- a. Tepak Sirih yang melambangkan sebuah kehormatan dalam adat-adat daerah sejak dahulu. Hal ini merupakan pokok budaya yang dipegang erat dan dijadikan tradisi oleh masyarakat dalam acara adat.
- b. Mahkota yang berukiran emas layaknya akar yang biasanya sering dipakai untuk hiasan pada pelaminan penganten. Mahkota merupakan lambang bahwa masyarakat Kabupaten masih berpegang erat dengan kebudayaan mereka.
- c. Jembatan Ogan, merupakan jembatan pertama dalam sejarah yang dibangun di Kabupaten OKU tepatnya di kota Baturaja.
- d. Aliran Sungai, dua gelombang merupakan lambang dari aliran sungai ogan di Baturaja yang berasal dari 2 (dua) aliran sungai yaitu Sungai Ogan dan Sungai Lengkayap.
- e. Rantai Emas Berjumlah 11 (Sebelas), merupakan lambang persatuan pada masyarakat Kabupaten OKU yang memiliki perbedaan suku dan agama namun tetap menjalin persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Pohon Karet, merupakan lambang dari karet sebagai bentuk potensi unggulan yang ada di Kabupaten OKU.
- g. Padi, merupakan lambang dari kemakmuran di Kabupaten OKU.
- h. Kapas, merupakan lambang dari kesejahteraan di Kabupaten OKU.
- i. Pabrik, merupakan lambang dari pergerakan dalam bidang industri di Kabupaten OKU.

- j. Keris berwarna merah emas dengan mata pisau mengarah keatas, merupakan lambang semangat hidup dan kepahlawanan masyarakat di Kabupaten OKU.
- k. OKU, merupakan lambang dari kesatuan yang erat antara masyarakat di Kabupaten OKU.
- l. Motto: Sebimbing Sekundang, merupakan bentuk dari adanya kesamaan serta tujuan yang berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada dalam lingkungan Kabupaten OKU.

Selain bentuk lambang, juga terdapat ketentuan warna yang terdapat dalam lambang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang artinya :

- a. Putih, memiliki arti kesucian/toleransi
- b. Hitam, memiliki arti keadilan
- c. Merah, memiliki arti Keberwiraan/Keberanian
- d. Kuning, memiliki arti Kebesaran/Keluhuran
- e. Hijau, memiliki arti Kesuburan dan Kemakmuran
- f. Biru, memiliki arti Kesetiaan
- g. Orange, memiliki arti Kemasyarakatan
- h. Kuning Emas, memiliki arti Kabupaten Ogan Komering Ulu yang kaya sumber daya alamnya

4. Visi dan Misi

- a. Visi : Terwujudnya Ogan Komering Ulu Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Berbudaya
- b. Sedangkan Misi terdiri dari :

1) Lebih Maju : Perspektif dalam dimensi infrastruktur

Pada poin pertama visi ini menjelaskan bahwa salah satu tolak ukur dalam keajuan daerah ialah dengan adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berlangsung dengan cepat, nyata, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah sebuah kabupaten maupun desa dengan memprioritaskan hubungan antar wilayah terkhusus wilayah perkebunan, terbelakang, dan perbatasan. Masyarakat diharapkan dapat memiliki moral, kecerdasan, menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi, selalu berpikir, bertindak untuk kepentingan yang lebih besar untuk masa depan yang lebih baik.

2) Sejahtera : Perspektif dalam dimensi sumber daya manusia

Pengembangan ekonomi masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan dalam pembangunan yang dimaskudkan agar masyarakat dapat memiliki penghasilan yang lebih baik untuk memenuhi standar kebutuhan hidup yang lebih layak. Masyarakat dengan keadaan fisik dan mental yang baik, sejahtera lahir, dan batin dalam kondisi ekonomi, politik, maupun sosial budaya yang kondusif.

3) Berbudaya : Perspektif dalam dimensi daya manusia

Perwujudan nilai-nilai luhur dalam masyarakat di bidang sosial budaya, keagamaan yang mengedepankan kearifan budaya lokal beriringan dengan didukungnya tingkat pendidikan, kesehatan serta penyelenggaraan pemerintah yang bersih, responsif, profesional, dan akuntabel.

c. Semboyan

Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki semboyan yakni pelaksanaan dan pembangunan adalah “Berkerja Untuk OKU Maju Dan Gemilang” yang artinya ialah penjelasan visi kedalam misi merupakan sebuah rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dari pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Berhubungan dengan pencapaian kinerja tersebut, misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan visi yang ditetapkan adalah :

Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (good goverment and clean governance) yaitu :

- 1) Perwujudan pemerintahan daerah dan desa yang efisien, amanah, responsif, transparan, akuntabel, dan terhindar dari adanya KKN
- 2) Dampaknya pada kinerja yang ideal oleh para aparatur pemerintahan daerah dan desa yang menghasilkan sebuah pelayanan daerah dan desa yang dapat memuaskan masyarakat
- 3) Bentuk dari pelayanan pemerintahan diantaranya : penyeleksian jabatan publik, peningkatan pendapatan dan efisiensi keuangan

daerah, pelayanan kependudukan gratis, pelayanan desa dan kecamatan one day services, pelayanan satu pintu, pengoptimalan perencanaan, pelaksanaan, pengawasam pembangunan, dan perbaikan hasil

Misi II : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan :

- 1) Sebuah perwujudan pembangunan manusia yang ditandai dari adanya peningkatan kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, tata tertib, dan penguatan keagamaan dalam bingkai pembangunan daerah dan desa.
- 2) Kualitas hidup individu dan masyarakat yang berdampak dalam bidang sosial, budaya, agama, maupun perannya dalam pembangunan desa dan daerah
- 3) Peningkatan kualitas hidup seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan, olahraga/seni/tari/ dan budaya, pariwisata, ketertiban, hubungan sosial, dan kependudukan, aktivitas keagamaan, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa, peran dunia usaha dalam pembangunan daerah.

Misi III: Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal :

- 1) Perwujudan pengembangan ekonomi masyarakat pada sumberdaya dan potensi yang ada disuatu wilayah.
- 2) Dampak pengembangan ekonomi yang diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera.
- 3) Pengembangan investasi dan kerajinan, kuliner, koperasi, inovasi, dan teknologi tepat guna, fasilitasi kawasan tumbuh cepat, pertanian/perkebunan/perikanan/perternakan, kube, padat karya, balai latihan dan ekonomi kreatif.

Misi IV: Melanjutkan Pembanguann Infrastruktur publik berdimensi wilayah :

- 1) Perwujudan pembangunan infrastruktur publik yang merata keseluruh wilayah kabupaten, kecamatan, dan kawasan tertentu

- 2) Pembangunan yang berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat dan wilayah itu sendiri, terlebih lagi wilayah dengan adanya kawasan perkebunan, terbelakang, dan perbatasan.
- 3) Pembangunan jalan kabupaten, jalan poros kecamatan, jembatan gantung, sarana kesehatan, sarana pendidikan, pasar kecamatan, air bersih, pencetakan sawah, sanitasi, persampahan, listrik, penataan kabupaten/kawasan, perumahan/permukiman kumuh dan usul perbaikan jalan nasional dan provinsi.

B. Komisi Pemilihan Umum

1. Komisi pemilihan umum (KPU)

Sejalan dengan diadakannya pemilihan umum (pemilu), maka dibutuhkan sebuah lembaga dalam penyelenggaraannya sehingga dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kegiatan berlangsungnya suatu pemilihan. Pembentukan KPU disebutkan dalam Pasal 22E UUD tahun 1945 dengan kedudukan sebagai penyelenggaraan pemilu bersifat nasional, tetap, mandiri atau independen. Hal ini menjadikan KPU sebagai lembaga yang penting secara konstitual (Asshiddique, 2006: 244). Independen yang dimaksud adalah tidak dinaungi oleh suatu lembaga tertentu sehingga diharapkan penyelenggaraan pemilu yang tidak memihak. Selain itu independensi juga berarti sebuah kekuatan, paradigma, etika, spirit sebagai sebuah jaminan dalam proses dan hasil dari diselenggarakannya pemilu sebagai bentuk dari kepentingan rakyat, bangsa sekarang maupun di masa mendatang (Marzuki, 2008)

2. Visi dan Misi

KPU memiliki visi yaitu sebagai tempat penyelenggaraan pemilihan umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk membentuk terwujudnya pemilihan umum yang luber dan jurdil. Sedangkan misi dari KPU yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang efektif juga efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- b) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggaraan pemilihan umum dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu.

- c) Menyusun regulasi dibidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
- e) Meningkatkan partisipasi dan kaulitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat negara kuat.
- f) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

3. Tugas dan Kewenangan

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor Tahun 2016 dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut :

- a) Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam form rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat
- b) Mengkoordinasi dan membantu tahapan pemilihan
- c) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan
- d) Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- e) Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan Kpu Kabupaten/Kota dalam mmelanjutkan pelaksanaan pemilihan jika Provinsi, Kabupaten,dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang
- f) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

Sedangkan Kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu sebagai berikut :

- a) Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota adil dan setara
- b) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemiihan kepada masyarakat: melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi adminitrasi pemilihan
- c) Melaksanakan keputusan DKKP

d) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten OKU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten OKU sudah berjalan selama dua periode yakni pada tahun 2013-2018 dan sekarang periode kedua sejak tahun 2019 sampai tahun 2024. KPU di Kabupaten/Kota memiliki landasan hukum berdasarkan pasal 22E Undang-undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan keanggotaan KPU terdiri atas orang-orang yang independen dan non partisan. Pemilihan keanggotaan KPU ini dilakukan secara terbuka dengan melalui beberapa tahapan yang cukup ketat dilakukan oleh tim seleksi yang juga independen terdiri atas masyarakat umum, akademisi, dan profesional.

Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang menjabat diperiode kedua tahun 2019-2024. Keanggotaan KPU di tingkat Kabupaten/Kota hanya sebanyak 5 orang. Di Kabupaten OKU juga memiliki keanggotaan KPU sebagai berikut :

- a) Ketua : Naning Wijaya, ST
- b) Anggota : Yudi Risandi, S. Sos, M. Si
- c) Anggota : Jaka Irhamka, SH
- d) Anggota : Dony Mardiyanto, SH
- e) Anggota : Rahmad Hidayat, SHi

C. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama dan terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan yakni ingin meraih kekuasaan (Budiardjo, 2017: 404). Keanggotaan parpol harus memiliki kepekaan di lingkungan sekitar masyarakat untuk dapat menampung dan menyerap isu-isu dari aspirasi masyarakat sehingga di dapatkan kesejahteraan maupun keadilan bagi seluruh masyarakat maupun keanggotaan parpol itu sendiri.

Menurut Lapalobara dan Myron Weiner dalam buku Yoyoh Rohaniah dan Efriza yang mengatakan bahwa terdapat terdapat 3 teori yang menjelaskan asal-

usul dari partai politik yakni *pertama*, teori kelembagaan yang membentuk sebuah keterkaitan antara parlemen dan munculnya parpol. Parpol dibentuk oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang membutuhkan adanya keanggotaan di parlemen yang dapat secara langsung dekat dengan masyarakat. Setelah itu parpol-parpol lain akhirnya berkembang dan dibentuk oleh masyarakat dalam kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. *Kedua*, teori situasi historik yang melihat sistem parpol yang berfungsi dalam mengatasi krisis di masyarakat. *Ketiga*, teori pembangunan yang melihat kehadiran parpol sebagai pemicu modernisasi sosial dan ekonomi dengan berbagai perubahan yang ditimbulkannya (Rohaniyah & Efriza, 2015: 359).

Perkembangan parpol diawali di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis dengan pusat kegiatan politiknya dilakukan oleh parlemen. Awalnya kegiatan ini memiliki sifat yang elitis dan aristokratis dengan berkepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Seiring berjalannya waktu kegiatan politik lalu berkembang di luar parlemen sehingga banyak terbentuk panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara dari pendukungnya menjelang pemilu. Kegiatan tersebut membuktikan bahwa pentingnya suara dari berbagai kalangan masyarakat untuk memperbesar organisasi massa. Oleh karena itu pada abad ke 19 lahirlah partai politik yang hingga sekarang menjadi penghubung di antara masyarakat dan pemerintah (Budiardjo, 2017:398).

2. Fungsi Partai Politik

Sebagai instrumen penting yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan di tingkat nasional maupun tingkat lokal, partai politik memiliki beberapa fungsi atas keberadaannya dalam sebuah peristiwa politik yakni sebagai berikut :

a. Sarana Komunikasi Politik

Negara demokrasi biasanya merupakan negara yang memiliki kebebasan dalam berpendapat sehingga hal ini seringkali memunculkan banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat. Untuk mempersatukan banyaknya perbedaan tersebut sehingga parpol bisa menjadi sebuah wadah dari banyaknya pendapat tersebut agar nantinya dapat di gabungkan dan dibentuk menjadi lebih tertata. Parpol merumusakannya sebagai usulan kebijakan untuk diperjuangkan dan disampaikan melalui parlemen

kepada pemerintah yang berkuasa untuk dijadikan suatu kebijakan umum.

b. Sarana Sosialisasi Politik

Parpol memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik yang merupakan sebuah wadah dalam masyarakat dengan bertujuan agar adanya edukasi politik melalui sosialisasi politik. Sosialisasi politik ini bertujuan untuk menimbulkan adanya partisipasi politik di dalam masyarakat sehingga terciptalah keikutsertaan masyarakat seperti pentingnya suara dalam pemilihan umum ataupun perlunya kepekaan terhadap lingkungan sekitar mereka contohnya terhadap efektivitas adanya suatu kebijakan.

c. Sarana Rekrutmen Politik

Parpol merupakan sebuah wadah yang dibentuk untuk menampung orang-orang yang memiliki keinginan dalam meraih kekuasaan disuatu negara ataupun daerah. Untuk itu parpol sebagai sarana sosialisasi politik juga mampu menarik minat orang-orang untuk bergabung dalam parpol tersebut.

d. Sarana Pengatur Konflik

Negara yang menganut sistem demokratis seringkali memiliki masyarakat yang bersifat terbuka sehingga perbedaan pendapat menjadi suatu hal yang sudah dianggap lumrah. Namun di negara yang memiliki masyarakat heterogen dengan banyak perbedaan seperti agama, suku, ras, bahasa, status sosial dan lainnya seringkali menimbulkan konflik. Parpol disini berfungsi sebagai penengah dari konflik-konflik yang ada dengan membulatkan suara menjadi satu-kesatuan yang nantinya akan dibentuk sebagai bentuk dari aspirasi-aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2017: 425).

3. Tipologi Partai Politik

Adapun cara parpol dalam berinteraksi dimasukkan dalam klasifikasi (tipologi) sistem kepartaian. Maurice Duverger seorang ilmuwan yang melakukan studi tentang parpol menjelaskan adanya klasifikasi (tipologi) partai berdasarkan jumlah partai yang ada disuatu negara yaitu :

a. Sistem Partai Tunggal

Sistem ini dikatakan suatu istilah yang hanya menyangkut diri sendiri (*contradiction in teminis*). Sistem ini ditujukan kepada suatu partai yang hanya ada disuatu negara maupun untuk partai yang mampu mendominasi partai lain di suatu negara (Rohaniyah & Efriza, 2015). Partai tunggal ini tedapat di beberapa negara seperti China dan Amerika. Sedangkan Uni Soviet dimasa kejayaannya juga menjadi partai terkuat dengan mendominasi partai-partai lainnya.

Sedangkan di Indonesia isu pembuatan partai tunggal terkabar pada tahun 1945 dengan adanya pokok-pokok dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno. Pembentukan partai ini belum terwujud dengan resmi oleh karena dianggap fasis dan cenderung tidak menginginkan adanya demokrasi yang pluralis (Rohaniyah & Efriza, 2015).

b. Dwi Partai

Sistem kepartaian ini ditujukan pada dua partai yang dominan serta berada pada dua tempat teratas atas kemenangannya dalam pemilihan umum secara bergantian.

Sistem ini membagi dua partai menjadi partai berkuasa dan partai oposisi. Partai oposisi berperan sebagai partai pengamat terhadap segala kebijakan partai yang berkuasa dan menduduki pemerintahan sehingga sewaktu-waktu posisi keduanya dapat bertukar.

Menurut Peter G.J. Pulzer mengatakan bahwa sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik jika terpenuhi syarat (1) Komposisi masyarakat bersifat homogen (2) Konsensus yang kuat ada dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik (3) adanya kontinuitas sejarah.

Negara-negara yang menganut sistem dwi partai ini yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Selandia Baru, Australia dan Filipina. Sedangkan di Indonesia pada tahun 1968 terdapat upaya untuk menggantikan sistem multi partai yang saat ini ada. Sistem kepartaian ini dihentikan pada tahun 1969 karena dianggap mengganggu partai-partai yang sudah ada dan merasa terancam eksistensinya (Budiardjo, 2017).

c. Multi Partai

Adanya negara-negara yang heterogen dengan banyak perbedaan ras, suku, agama, status sosial membuat banyaknya golongan-golongan masyarakat bergerak dalam suatu wadah yang terbatas. Untuk itu adanya pola multi partai ini dianggap sistem yang tepat dibandingkan sistem dwi partai.

Pada sistem ini golongan-golongan masyarakat diberikan kesempatan dalam membentuk partai-partai baru sesuai dengan ideologi tiap-tiap partai. Akibatnya suara dari masing-masing partai oposisi kecil seringkali lemah. Sehingga hal ini menjadi sebuah kekurangan pada sistem ini jika dibandingkan dengan sistem partai tunggal dan sistem dwi partai yang partai oposisi nya memiliki kedudukan yang hampir seimbang dengan partai yang berkuasa. Oleh karena itu partai harus mencari koalisi dalam membentuk suara yang lebih besar.

Sistem multi partai ini terdapat di beberapa negara seperti Malaysia, Austria Prancis, Swedia, Federasi Rusia dan Indonesia. Di Indonesia sistem ini banyak melalui perjalanan yang panjang sehingga pada tahun 1989 sistem multi partai di Indonesia berusaha mengambil sisi positif dari terbentuknya sistem multi partai terdahulu.

4. Partai Politik di Kabupaten OKU

Partai Politik merupakan instrumen penting yang ada dalam politik lokal di Kabupaten OKU. Adanya parpol ini juga tentunya turut serta meramaikan variasi terkait ideologi dengan masing-masing perbedaan di tiap-tiap partainya. Perbedaan ini berhubungan dengan visi dan misi dari partai namun juga memiliki satu tujuan yang sama yaitu mewujudkan cita-cita dalam hal memajukan daerah yaitu Kabupaten OKU. Parpol yang ada di Kabupaten OKU merupakan bagian atau cabang dari parpol besar yang ada di lingkup nasional seperti Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PDIP, Partai Demokrat, Partai Hanura, PKS, PPP, PBB, PKPI, Partai Berkarya, PSI, dan Partai Garuda.